



## Financial Performance Analysis of Regency and City Governments in North Sumatera

### Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara

Yosephine Magdalena Sipahutar<sup>1)</sup>; Irawan<sup>2)</sup>; Tia Novira Sucipto<sup>3)</sup>  
<sup>1,2,3)</sup>Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Sumatera Utara, Indonesia  
Email: [yosefinesipahutar02@gmail.com](mailto:yosefinesipahutar02@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [27 Februari 2026]  
Revised [04 April 2026]  
Accepted [07 April 2026]

#### KEYWORDS

PAD, Financial Performance,  
Independence Ratio.

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah di Sumatera Utara khususnya pada Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Toba, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Deli Serdang—berdasarkan rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi PAD periode 2020-2024. Menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data Laporan Realisasi APBD, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal seluruh daerah masih rendah hingga sangat rendah, meskipun beberapa daerah mengalami tren peningkatan. Rasio efektivitas PAD umumnya berada pada kategori efektif hingga sangat efektif, menandakan kemampuan daerah dalam memenuhi target pendapatan. Namun, rasio efisiensi menunjukkan ketidakefisienan pada sebagian besar tahun, mengindikasikan belanja daerah yang belum sebanding dengan kemampuan PAD. Temuan ini menekankan perlunya Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan PAD serta peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran untuk memperbaiki kinerja keuangan daerah.

#### ABSTRACT

This study analyzes the financial performance of local governments in North Sumatra—specifically Medan City, Binjai City, Toba Regency, Simalungun Regency, and Deli Serdang Regency—based on the independence, effectiveness, and efficiency ratios of locally generated revenue (PAD) for the period 2020–2024. Using a descriptive quantitative method with data sourced from the Regional Budget Realization Reports, the findings indicate that fiscal independence across all regions remains low to very low, although several areas show a gradual upward trend. The PAD effectiveness ratio generally falls within the effective to highly effective categories, reflecting the regions' ability to meet revenue targets. However, the efficiency ratio indicates inefficiency in most years, suggesting that regional spending is not aligned with the capacity of PAD. Overall, the study highlights the need to strengthen PAD and improve budget efficiency in order to enhance the financial performance of local governments.

## PENDAHULUAN

Fenomena pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah di tingkat kabupaten dan kota. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (2024), realisasi PAD rata-rata hanya mencapai sekitar 73,6% dari target yang ditetapkan, dengan realisasi pajak daerah sebagai komponen utama PAD sebesar 73,2%. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber pendapatan lokal, khususnya pajak dan retribusi daerah. Sementara itu, realisasi belanja daerah secara keseluruhan hanya mencapai 60,4% dari anggaran yang dialokasikan, dengan penyerapan belanja modal dan belanja barang dan jasa yang masih rendah, masing-masing sebesar 38,5% dan 57,7% (BPS Sumut, 2024). Ketidakseimbangan ini berpotensi menimbulkan defisit fiskal serta ketergantungan tinggi pada transfer dana dari pemerintah pusat yang dapat menghambat kemandirian fiskal daerah. Distribusi penggunaan anggaran juga menunjukkan ketidakseimbangan antar wilayah di Sumatera Utara, khususnya di kabupaten/kota seperti Medan, Binjai, Toba, Simalungun, dan Deli Serdang. Analisis kinerja keuangan di Kota Medan dan Binjai menunjukkan fluktuasi realisasi anggaran yang mengindikasikan inkonsistensi pengelolaan keuangan daerah (Harahap, 2019).

Kondisi ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan optimalisasi sumber daya lokal. Kabupaten Toba, Simalungun, dan Deli Serdang menghadapi tantangan serupa terkait kemandirian fiskal dan efisiensi penggunaan anggaran. Dinilai dari sudut pandang teori, teori stewardship menekankan pengelolaan keuangan daerah seharusnya menitikberatkan pada tiga indikator utama: kemandirian fiskal, efektivitas, dan efisiensi penggunaan anggaran. Kemandirian fiskal penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat, sehingga mampu mendukung pembangunan daerah secara mandiri. Efektivitas pengelolaan anggaran menjadi tolok ukur keberhasilan

realisasi pendapatan dan belanja yang tepat sasaran, sementara efisiensi memastikan bahwa penggunaan keuangan dilakukan hemat tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. Tingginya ketergantungan pada transfer pusat dapat mengurangi otonomi fiskal dan fleksibilitas pengelolaan prioritas pembangunan daerah, sehingga menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi persoalan utama yang menghambat tercapainya kemandirian fiskal. Ketergantungan ini menimbulkan risiko berkurangnya fleksibilitas serta otonomi daerah dalam menetapkan prioritas pengeluaran dan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal. Selain itu, efektivitas pengelolaan anggaran juga menjadi perhatian serius, mengingat tingginya realisasi anggaran belum tentu mencerminkan tercapainya hasil yang optimal. Pemborosan atau penyerapan anggaran yang tidak tepat sasaran menjadi tantangan besar yang harus diatasi melalui peningkatan efektivitas pengelolaan.

Di sisi lain, efisiensi keuangan daerah juga tak kalah penting, terutama karena berkaitan dengan keberlanjutan fiskal dan kepercayaan publik. Efisiensi menuntut pemerintah daerah untuk mampu memanfaatkan sumber daya terbatas dengan cara yang paling hemat sekaligus memberikan hasil maksimal, tanpa mengurangi kualitas layanan maupun pembangunan. Pemerintah daerah di Sumatera Utara, terutama di kabupaten/kota yang menjadi fokus penelitian ini, memiliki mandat meningkatkan kemandirian fiskal serta efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku, termasuk UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Kementerian Dalam Negeri, 2019). Melalui optimalisasi PAD dan perbaikan manajemen anggaran, diharapkan daerah mampu mengelola sumber daya keuangan secara mandiri untuk mendukung keberlanjutan pembangunan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oby Remanta dan Puja Rizqy Ramadhan (2024) menganalisis kinerja keuangan pemerintah di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi selama periode 2021-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah, menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada transfer dana dari pemerintah pusat, meskipun terdapat peningkatan rasio efektivitas yang cukup efektif dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan. Namun, rasio efisiensi masih termasuk kurang efisien, yang berarti penggunaan anggaran belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Medan, Binjai, Toba, Simalungun, dan Deli Serdang selama periode 2020-2024 dengan fokus pada rasio kemandirian fiskal, efektivitas realisasi anggaran, dan efisiensi penggunaan anggaran sebagai indikator utama penilaian kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara optimal untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

## LANDASAN TEORI

### Stewardship Theory

Teori Stewardship menunjukkan bahwa pengelola publik (sebagai steward) cenderung memprioritaskan kinerja organisasi bukan semata untuk kepentingan pribadi, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan publik (Syahara et al., 2024). Dalam konteks sektor publik, teori ini menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi amanah (steward) untuk mengelola sumber daya keuangan secara bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat luas. Pendekatan tersebut menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola yang baik dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran sebagai upaya mencapai kemandirian, efektivitas, dan efisiensi keuangan daerah. Terlepas dari perspektif tersebut, penelitian ini menelaah sejauh mana prinsip-prinsip stewardship diterapkan dalam manajemen keuangan daerah dan bagaimana penerapannya berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Zanra, 2024)

### Laporan Keuangan Akuntansi Sektor Publik

Laporan keuangan akuntansi sektor publik merupakan penyajian informasi keuangan yang dilakukan oleh entitas pemerintahan guna memberikan gambaran mengenai posisi keuangan, kinerja fiskal, dan perubahan dana publik selama satu periode. Proses ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta undang-undang terbaru yang mewajibkan entitas pemerintah menyusun laporan seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), serta Laporan Perubahan Ekuitas—seluruhnya bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan

### Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu daerah dalam mengidentifikasi dan mengelola sumber pendapatan asli daerah dengan cara yang efektif,



efisien, dan transparan. Indikator ini penting sebagai tolok ukur pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, mencakup pendapatan dan belanja daerah (Hadli & Zelika, 2020). Pengukuran kinerja ini sering menggunakan rasio-rasio seperti efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan untuk menilai kemampuan daerah mencapai target anggaran secara berkelanjutan.

### **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mencerminkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri pelaksanaan program serta penyelenggaraan urusan pemerintahan tanpa bergantung pada sumber pendanaan eksternal. Rasio ini dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, yang mencerminkan sejauh mana daerah dapat menggunakan sumber daya internalnya dalam mengelola keuangan. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian daerah yang lebih besar dan menandakan rendahnya ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat (Mahmudi, 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan menggambarkan dan menjelaskan kondisi kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, Binjai, Toba, Simalungun, dan Deli Serdang. Proses analisis dilakukan melalui pengumpulan serta pengkajian data faktual yang relevan dan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran mengenai pengelolaan keuangan daerah. Data penelitian bersumber dari laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh BPK Perwakilan Sumatera Utara, dengan cakupan periode pengamatan tahun 2020 hingga 2024. Evaluasi kinerja keuangan dilakukan menggunakan tiga rasio utama, yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi, yang menjadi tolok ukur dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola keuangan secara optimal.

### **Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Teknik ini dilakukan dengan menghitung rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Menurut Halim (2012), rasio ini menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan secara mandiri. Adapun rumus dari rasio ini yaitu::

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

### **Analisis Rasio Efektivitas PAD**

Analisis dilakukan dengan membandingkan realisasi PAD dengan target yang ditetapkan. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa rasio mencapai di atas 100% menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam tata kelola penerimaan daerah. Menurut Halim (2018), rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target PAD yang telah ditetapkan dalam anggaran. Adapun rumus dari rasio ini yaitu:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan}}$$

### **Analisis Rasio Efisiensi PAD**

Kusufi (2014) menyebut rasio efisiensi yang rendah menandakan pengelolaan PAD yang semakin optimal dan hemat sumber daya. Menurut Halim (2018), rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggarannya agar belanja yang dikeluarkan tidak melebihi pendapatan yang diterima. Adapun rumus dari rasio ini yaitu:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Rasio Efektivitas PAD

**Table 1 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Daerah Kota Medan 2020-2024**

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektivitas	Pola Hubungan
2020	1.509.483.588.000	4.121.585.752.000	36,62%	Tidak Efektif
2021	5.021.257.837.136	5.208.964.175.119	96,40%	Efektif
2022	5.657.816.889.106	6.552.123.770.774	86,35%	Cukup Efektif
2023	5.813.878.848.669	7.296.157.352.009	79,68%	Kurang Efektif
2024	6.294.921.900.176	7.166.410.196.201	87,84%	Cukup Efektif
<b>Rata – Rata Rasio Efektivitas Tahun 2020-2024</b>				<b>77,38%</b>

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2025 (diolah)

### Rasio Efisiensi PAD

**Table 2 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi PAD Daerah Kota Medan 2020-2024**

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi PAD	Rasio Efisiensi	Rentang Penilaian
2020	3.993.250.000.000	1.509.483.588.000	264,54%	Tidak Efisien
2021	4.500.515.560.809	5.021.257.837.136	89,63%	Cukup Efisien
2022	6.047.157.448.152	5.657.816.889.106	106,88%	Tidak Efisien
2023	6.246.261.417.557	5.813.878.848.669	107,44%	Tidak Efisien
2024	6.258.347.199.239	6.294.921.900.176	99,42%	Kurang Efisien
<b>Rata – Rata Rasio Efisiensi Tahun 2020-2024</b>				<b>133,58%</b>

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2025 (diolah)

Data pada tabel menunjukkan bahwa rasio efisiensi PAD Kota Medan selama periode 2020–2024 mengalami fluktuasi yang cukup mencolok dan secara umum berada pada kategori tidak efisien. Pada tahun 2020, rasio efisiensi mencapai 264,54%, yang berarti belanja daerah jauh lebih besar dibandingkan PAD yang dihasilkan sehingga masuk kategori tidak efisien. Kondisi ini membaik signifikan pada 2021 dengan rasio 89,63% dan berada pada kategori cukup efisien. Namun, pada 2022 dan 2023 rasio kembali meningkat menjadi 106,88% dan 107,44%, yang menunjukkan bahwa pengeluaran masih melampaui kemampuan PAD sehingga dikategorikan tidak efisien. Pada 2024, rasio menurun menjadi 99,42%, tetapi tetap berada dalam kategori kurang efisien. Secara rata-rata, rasio efisiensi selama lima tahun mencapai 133,58%, mencerminkan bahwa secara keseluruhan pengelolaan PAD relatif belum optimal dalam menutupi belanja daerah, sehingga efisiensi fiskal Kota Medan masih membutuhkan perbaikan berkelanjutan.

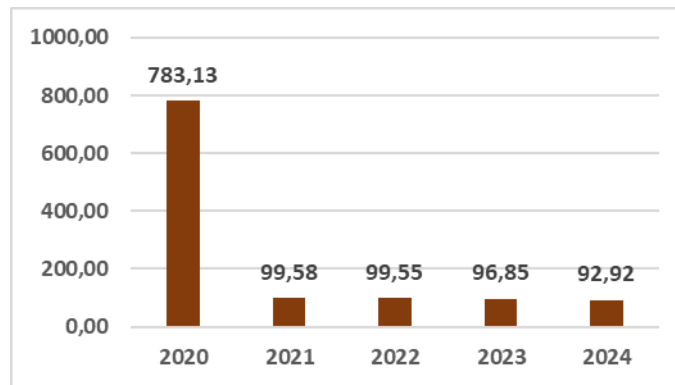
**Table 3. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi PAD Daerah Kota Binjai 2020-2024**

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi PAD	Rasio Efisiensi	Rentang Penilaian
2020	879.250.000.000	112.273.545.000	783,13%	Tidak Efisien
2021	789.340.473.517	792.666.664.292	99,58%	Kurang Efisien
2022	889.939.112.585	893.937.866.292	99,55%	Kurang Efisien
2023	890.279.781.891	919.219.597.545	96,85%	Kurang Efisien
2024	853.937.885.923	919.035.164.201	92,92%	Kurang Efisien
<b>Rata – Rata Rasio Efisiensi Tahun 2020-2024</b>				<b>234,41%</b>

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2025 (diolah)



**Gambar 1 Rasio Efisiensi PAD Daerah Kota Binjai 2020-2024**

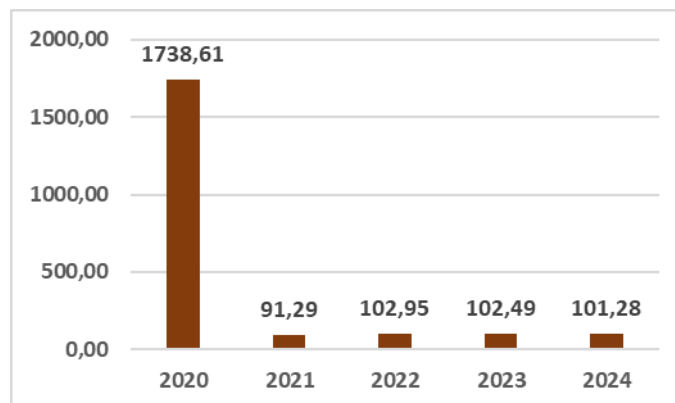


**Table 4 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi PAD Daerah Kabupaten Toba 2020-2024**

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi PAD	Rasio Efisiensi	Rentang Penilaian
2020	997.960.000.000	57.400.000.000	1738,61%	Tidak Efisien
2021	946.901.072.799	1.037.238.644.198	91,29%	Kurang Efisien
2022	1.050.130.916.931	1.020.022.554.853	102,95%	Tidak Efisien
2023	999.283.227.084	975.003.811.448	102,49%	Tidak Efisien
2024	1.225.234.800.115	1.209.731.554.523	101,28%	Tidak Efisien
<b>Rata – Rata Rasio Efisiensi Tahun 2020-2024</b>				<b>427,32%</b>

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2025 (diolah)

**Gambar 2. Rasio Efisiensi PAD Daerah Kabupaten Toba 2020-2024**



Data pada tabel menunjukkan bahwa rasio efisiensi PAD Kabupaten Toba sepanjang 2020–2024 berada pada level yang relatif tidak efisien, dengan kesenjangan yang besar antara belanja daerah dan kemampuan PAD dalam menutupinya. Tahun 2020 mencatat rasio efisiensi yang sangat tinggi, yaitu 1.738,61%, yang menandakan tingkat ketidakefisienan ekstrem. Meskipun terjadi penurunan drastis pada 2021 dengan rasio 91,29% yang masuk kategori kurang efisien, kondisi tersebut kembali memburuk pada 2022 hingga 2024 dengan rasio masing-masing 102,95%, 102,49%, dan 101,28%, seluruhnya berada pada kategori tidak efisien. Secara rata-rata, rasio efisiensi periode 2020–2024 mencapai 427,32%, menggambarkan bahwa pengeluaran daerah jauh melampaui pendapatan asli daerah yang mampu dihimpun. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa Kabupaten Toba masih menghadapi tantangan besar dalam mengoptimalkan PAD sebagai sumber pembiayaan belanja daerah dan memerlukan strategi pengelolaan fiskal yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Rasio kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Sumatera Utara selama periode 2020–2024 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah masih berada pada kategori rendah hingga sangat rendah. Kota Medan menjadi daerah dengan capaian tertinggi, sementara Kota Binjai, Kabupaten Toba, dan Kabupaten Simalungun cenderung stagnan pada pola hubungan instruktif yang menandakan ketergantungan kuat pada dana transfer pusat. Kabupaten Deli Serdang menunjukkan tren yang lebih baik, meskipun tetap berada pada kategori rendah secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah masih belum memberikan ruang fiskal yang memadai bagi pemerintah daerah untuk bergerak lebih mandiri.

Dari sisi efektivitas PAD, sebagian besar daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan sepanjang periode penelitian. Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Toba, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Deli Serdang menunjukkan kemampuan yang semakin baik dalam memenuhi target pendapatan, terutama setelah tahun 2021. Nilai efektivitas pada banyak tahun berada pada kategori efektif hingga sangat efektif, menandakan bahwa mekanisme perencanaan dan pemungutan PAD sudah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, beberapa tahun dengan efektivitas sangat rendah mengindikasikan perlunya evaluasi berkala terhadap estimasi target dan strategi pemungutan pendapatan daerah.

Berbeda dengan perkembangan efektivitas, tingkat efisiensi pengelolaan PAD masih menunjukkan tantangan besar di hampir semua daerah. Rasio efisiensi yang sering berada di atas 100% mencerminkan bahwa belanja daerah tidak sebanding dengan kontribusi PAD, sehingga prinsip efisiensi belum sepenuhnya tercapai. Fluktuasi efisiensi yang signifikan dari tahun ke tahun juga menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam pengendalian belanja dan pemanfaatan pendapatan asli daerah. Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun pendapatan dapat dicapai, kualitas pengelolaannya belum optimal dan memerlukan penataan ulang.

### Saran

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menguatkan temuan-temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa kemandirian fiskal di banyak daerah masih rendah, efektivitas PAD relatif baik, dan efisiensi anggaran masih menjadi persoalan mendasar dalam tata kelola keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat strategi peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan, modernisasi sistem pemungutan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas belanja daerah. Upaya ini perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kapasitas fiskal daerah meningkat, ketergantungan pada transfer pusat berkurang, dan keberlanjutan pembangunan daerah dapat terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambya, S. E. (2023). Buku Ajar Ekonomi Keuangan Daerah (hlm. 115–116). Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja. <http://repository.lppm.unila.ac.id/51451/1/BUKU%20EKONOMI%20KEUANGAN%20DAERAH.pdf>
- Anahida, R. (2022). Analisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur tahun 2018–2021. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 7(2), 45–60.
- Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 95–102. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158>
- Ayuni, D., Pratiwi, N., & Rahman, A. (2023). Analisis efektivitas pendapatan asli daerah dalam mendukung kemandirian fiskal pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 11(1), 23–35.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2025). BPS Provinsi Sumatera Utara. <https://sumut.bps.go.id/id>
- Damanik, I. M., Juzilam, S., & Situmeang, C. (2025). OPEN GOVERNMENT FRAMEWORK AND PERFORMANCE: AN INTERACTION APPROACH WITHIN THE CONCEPT OF ENTERPRISE RISK MANAGEMENT FOR LOCAL GOVERNMENTS IN INDONESIA. *Lex Localis: Journal of Local Self-Government*, 23(11).
- Fadhilla, R. N., Nissa, D. N. F., & Putri, M. A. (2025). Menakar kemandirian keuangan daerah: Studi kasus ketergantungan fiskal Kabupaten Magelang 2020–2024. *KEUDA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 10(2). <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/KEUDA/article/view/4746>
- Hadli, M., & Zelika, F. (2020). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 5(2), 77–89.



- Halim, A. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2018). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2021). Teori dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, J. P. R., & Nasution, M. D. (2019). Analisis kemandirian dan efektivitas keuangan pada kinerja Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Administrasi Bisnis*.  
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/janis/article/view/22406>
- Irawan. (2020). Analisis manajemen persediaan, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Irawan, I., Muda, I., Juzilam, S., & Situmeang, C. (2026). Open Government Framework Model to Performance for Local Governments in Indonesia. In *The Future of Work: How Technology is Transforming Jobs and Skills* (pp. 675-684). Cham: Springer Nature Switzerland.
- Irawan, I. R. N., & Sani, A. ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY OF DISTRICT FINANCIAL REPORTS.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Kusufi, M. S. (2014). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 6(1), 15–27.
- Lita, L. H. G., Syahputri, A., Niswa, K., & Harnia, A. (2025). MODEL GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 8(1), 1-12.
- Mahmudi. (2019). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2020). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 8(1), 1–15.
- Manurung, R., Situmorang, D., & Siregar, A. (2024). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Daerah*, 9(2), 88–104.
- Marsudi, J., Supradi, A., & Susandra, F. (2019). Tingkat kemandirian, efisiensi, efektivitas, dan pertumbuhan pendapatan asli daerah: Kajian pada Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akunida*, 5(2), 32–46. <https://ojs.unida.ac.id/index.php/JAKD/article/view/2247>
- Melmambessy, V. (2022). Efektivitas pendapatan asli daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 55–66.
- Milenia, A. F., Siregar, M., & Lubis, R. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran sebagai pengukuran kinerja pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 6(1), 12–28.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2019). Akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 7(2), 33–45.
- Mardiasmo. (2021). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
- Oby Remanta. (2024). Analisis kinerja keuangan pemerintah berdasarkan rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi di Provinsi Sumatera Utara  
*Jasmien*, 5(2). <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/article/view/1193>
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (2021). Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara. <https://prp2sumut.sumutprov.go.id>
- Permendagri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Pratiwi, N. (2024). Implementasi SAP berbasis akrual dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Publik Indonesia*, 12(1), 1–14.
- Putra, R., & Hidayat, W. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(2), 101–112.
- Runjung, A., Situmorang, H., & Ginting, R. (2022). Analisis rasio kemandirian keuangan daerah dalam era desentralisasi fiskal. *Jurnal Keuangan Daerah*, 8(1), 44–58.
- Sahala Purba, D., Sihotang, H., & Nainggolan, R. (2024). Analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Karo. *Jurnal Akuntansi Regional*, 10(1), 55–73.
- Sari, P. (2022). Laporan keuangan sektor publik dan implikasinya terhadap akuntabilitas pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 5(2), 67–81.
- Sembiring, J. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 4(1), 22–34.
- Soraya, T. (2018). Analisis kemampuan pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja daerah di Pemerintah Kabupaten Batu Bara tahun 2012–2016. *Jurnal Akuntansi Daerah*, 3(2), 1–15.

- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sucipto, T. N. (2019). Pengaruh sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi*
- Syahara, R., Putra, F., & Aminah, S. (2024). Penerapan stewardship theory dalam tata kelola keuangan daerah. *Jurnal Governance*, 12(1), 1–14.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Yuliana, L. (2014). Analisis pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 45–59.
- Zanra, S. W. (2024). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, komunikasi, dan profesionalisme terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan Permendagri. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JILAK)*. <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jilak/article/download/83/97>